

## **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli**

**Moh. Sakir<sup>1</sup>, Trisna<sup>1\*</sup>, Hasanuddin Hi Pende<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli  
Jl. Madako No. 01 Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

\*Email : [Trisna.se.2608@gmail.com](mailto:Trisna.se.2608@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pajak daerah mempunyai dampak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Sebelum menggunakan teknik analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum menguji hipotesis. Variabel independen (X) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), dengan jumlah data yang dikumpulkan dari tahun 2013 hingga 2022. Terakhir, pajak daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk variabel kemandirian keuangan daerah, variabel pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 49,1%, dan variabel yang tidak diteliti memberikan kontribusi sebesar 50,9%.

***Kata kunci : pajak, keuangan, tolitoli***

### **ABSTRACT**

This research aims to find out whether local taxes have an impact on the level of regional financial independence of Tolitoli Regency from 2013 to 2022. The analysis was carried out using a quantitative approach. Before using data analysis techniques, classical assumption testing is carried out before testing the hypothesis. The independent variable (X) in this study significantly influences the dependent variable (Y), with the amount of data collected from 2013 to 2022. Lastly, regional taxes contribute significantly to the level of regional financial independence. For the regional financial independence variable, the regional tax variable contributed 49.1%, and the variables not studied contributed 50.9%.

***Keywords: tax, finance, tolitoli***

### **PENDAHULUAN**

Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan seiring dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (6), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebutuhan akan pemerintah daerah meningkat sebagai akibat dari penerapan otonomi sebagai cara untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk dieksploitasi tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan. Oleh karena itu, konsekuensi logis berikutnya dari otonomi adalah pemerintah pusat mengalokasikan uang untuk mengisi celah fiskal. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang diatur, pemerintah pusat mengalokasikan pendapatan ke dalam struktur APBD.

Pemerintah daerah diharapkan dapat membiayai pembangunan, otonomi kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah harus memiliki kualitas sumber daya untuk meningkatkan PAD mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat. PAD, khususnya pajak, harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar dan didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Pemerintah daerah harus membuat anggaran untuk menjalankan pemerintahannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk mendapatkan otonomi, daerah harus memiliki kemampuan keuangan untuk memaksimalkan kekayaan mereka. Salah satu cara untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah adalah dengan melihat PAD. Ini sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan, khususnya PAD. Oleh karena itu, Kabupaten Tolitoli harus mampu meningkatkan PAD-nya melalui pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah; itu adalah sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran umum tentang perkembangan realisasi pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013 hingga 2022.

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengeluaran Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013-2022

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pengeluaran Daerah (TKD)</b>	<b>Kemandirian Keuangan Daerah</b>
2013	10.642.868.000	24.148.419.000	609.747.340.000	3,96%
2014	6.718.148.000	47.846.420.000	724.609.872.000	6,60%
2015	7.945.933.000	63.600.801.000	865.617.496.000	7,35%
2016	9.610.146.000	63.623.624.000	946.614.743.000	6,72%
2017	12.659.752.000	100.514.206.000	1.100.849.886.000	9,13%
2018	16.543.712.274	80.312.116.000	1.019.779.241.000	7,88%
2019	18.165.639.000	91.724.083.000	1.152.615.934.000	7,96%
2020	15.326.314.000	96.205.584.000	1.095.466.697.000	8,78%
2021	15.662.590.000	130.208.815.000	1.118.273.989.000	11,64%
2022	41.949.451.000	159.987.507.000	1.120.311.936.000	14,28%

*Sumber data : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013-2022*

Tabel di atas menunjukkan peningkatan dan penurunan pajak daerah setiap tahun. Pajak daerah kabupaten Toli-Toli pada tahun 2022 meningkat 25,92%, atau 26.286.861.000, dari tahun sebelumnya. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah berubah setiap tahun dan biasanya berada di bawah ambang 0 hingga 25, menandakan bahwa daerah tidak mampu menjalankan otonomi keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli" dapat dilakukan untuk menentukan apakah pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

### *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Studi ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli, yang berlokasi di Jl. Moh. Bantilan No.1 Kel. Baru Tolitoli, dan dimulai pada bulan Juli 2023 hingga pengambilan data selesai untuk menyusun tugas akhir.

### *Jenis penelitian*

Dengan mengubah data menjadi data numerik, penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk membuat hipotesis, menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan menjelaskan bagaimana variabel independen dan variabel dependen berhubungan satu sama lain.

### *Operasionalisasi Variabel*

Menurut Sugiyono (2019), operasional variabel penelitian adalah sesuatu atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan atau dipelajari oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Dua variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), yang masing-masing menentukan pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variabel Dependen, atau variabel yang terikat

Sugiyono (2019:69) mengatakan bahwa variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat disebut sebagai variabel terikat karena ada variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah, yang berarti kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber daerah yang diperlukan.

Variabel independen, juga dikenal sebagai variabel bebas

Sugiyono (2019:69) mengatakan bahwa variabel yang mempengaruhi atau membuat variabel dependen berubah atau muncul disebut variabel bebas. Dua variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X). Pajak daerah berasal dari pajak kabupaten atau kota, yang dihitung dalam satuan rupiah, dan merupakan pendapatan daerah dari pemungutan pajak.

Tabel 2. Matriks Operasional variabel

Variabel	Pengertian	Indikator	Rasio
Tingkat	Kemampuan dan kewenangan untuk	1. Pendapatan	Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Wahyuningsih (2020:274)	menggali sumber sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.	2.	Asli Daerah Pengeluaran Daerah
Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X) UUD No.28 Tahun 2009	Pembayaran wajib daerah yang terutang oleh orang atau badan yang diwajibkan menurut undang-undang dan tidak dikompensasikan secara langsung di gunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang paling sejahtera bagi rakyat	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parkir 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang wallet 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan 11. Bea perolehan atas tanah dan bangunan	Rasio

Sumber: para ahli

### ***Jenis Dan Sumber Data***

#### ***Jenis Data***

Menurut Sugiyono (2019:137), jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dan diberikan kepada pengumpul data secara tidak langsung.

#### ***Sumber Data***

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (BKD) dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sumber data yang digunakan.

#### ***Teknik pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan gambaran, kondisi, dan landasan teoritis tentang judul penelitian, teknik pengumpulan data ini sangat membantu. Peneliti melakukan penelitian ini dengan membaca dan mempelajari literatur, e-book, artikel, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya yang dapat membantu dalam penelitian mereka. Data dapat diperoleh dengan meminta laporan keuangan pemerintah daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (BKD) atau dengan mengunduh data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di [sulteng.bps.go.id](http://sulteng.bps.go.id).

#### ***Teknik Analisis Data***

Pajak daerah, sebagai variabel bebas, dan tingkat kemandirian keuangan daerah, sebagai variabel terikat, dipengaruhi oleh analisis regresi linear sederhana.

Salah satu rumus regresi linear sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = a + b x$$

Dimana,  $Y'$  = Nilai yang diprediksi,  $a$  = Konstanta atau bila harga  $X = 0$ ,  $b$  = Koefisien regresi,  $X$  = Nilai variabel independen

### ***Uji Asumsi Klasik***

#### ***Uji Normalitas***

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Analisis grafik dan uji statistik adalah dua metode untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal (Ghozali 2017:127).

#### ***Uji Linearitas***

Uji linearitas dilakukan untuk menentukan apakah ada atau tidak hubungan linear antara variabel dependen dan masing-masing variabel independen. Tidak mungkin menggunakan model regresi linear jika model tidak memenuhi syarat linearitas. Jika variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear, uji linearitas dapat digunakan (Sugiono dan Susanto, 2015:323). Test of linearity dapat digunakan untuk menguji linearitas.

#### ***Uji Heteroskedastisitas***

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam variabel dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika variabel dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, uji tersebut disebut homoskedastisitas, dan jika tidak, uji tersebut disebut heteroskedastisitas. Tanda model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau heteroskedastisitas yang tidak ada. Sebagian besar situasi heteroskedastisitas ditemukan dalam data cross-section, yang menghimpun data dari berbagai ukuran, termasuk kecil, sedang, dan besar (Ghozali,2017).

#### ***Uji Autokorelasi***

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  dalam model regresi linier memiliki korelasi satu sama lain. Ketika ada korelasi, masalah yang muncul adalah autokorelasi. Ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu berhubungan satu sama lain, disebut autokorelasi. Masalah ini terjadi karena residual, atau kesalahan pengganggu, yang tidak dapat dilepaskan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Dalam data cross-section (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena "gangguan" pada individu atau kelompok yang berbeda pada periode berikutnya. Ini karena "gangguan" pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Salah satu jenis model regresi yang sangat baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak autokorelasi:

$H_0$  : Tidak terdapat Autokorelasi ( $r = 0$ )

$H_1$  : Terdapat Autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Adapun Uji Durbin Watson ( Uji DW) memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika  $d < d_L$  atau  $d > (4-d_L)$  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika  $d_U < d < (4-d_U)$  maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika  $d_L < d < d_U$  atau  $(4-d_U) < d < (4-d_L)$  maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti / ragu-ragu (Ghozali,2017).

### *Uji korelasi*

Jika peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen dan dependent, analisis korelasi parsial digunakan untuk menganalisis atau menguji hipotesis. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, metode statistik ini sering digunakan. (Sugiono, 2018):286).

### *Analisis Regresi Linear Sederhana*

Analisis regresi linear sederhana menentukan arah hubungan linear antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Ini juga menentukan apakah variabel independen meningkat atau menurun.

### *Pengujian Hipotesis*

Uji hipotesis menggunakan p-value atau koefisien regresi sederhana untuk menentukan apakah variabel independen (X) berdampak signifikan pada variabel dependen (Y). Signifikan berarti dapat berdampak pada populasi. Langkah-langkah pengujian berikut dapat digunakan untuk mengetahui hasil analisis regresi di atas:

- a. Menentukan Hipotesis  
Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten Tolitoli  
Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten Tolitoli
- b. Membandingkan taraf signifikansi (p-value), dengan galatnya  
Jika signifikansi  $> 0.05$ , maka Ho diterima  
Jika signifikansi  $< 0.05$ , maka Ho ditolak

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 3 menunjukkan peningkatan dan penurunan pajak daerah setiap tahun. Realisasi pajak daerah meningkat setiap tahun dari tahun 2014 hingga 2019. Ini terjadi karena petugas diberi kendaraan dinas untuk melatih para wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan memenuhi kewajibannya.

Table 3. Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	% Pajak Daerah
2013	10.642.868.000	10,03%
2014	6.718.148.000	9,59%
2015	7.945.933.000	9,09%
2016	9.610.146.000	9,22%
2017	12.659.752.000	9,48%
2018	16.543.712.274	9,59%
2019	18.165.639.000	9,21%

2020	15.326.314.000	9,45%
2021	15.662.590.000	8,53%
2022	41.949.451.000	10,42%

Karena krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, realisasi pajak daerah Kabupaten Tolitoli pada tahun 2020 menurun. Akibatnya, pemerintah melakukan pembebasan pajak bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), serta pengurangan pokok tunggakan pajak dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ternyata kenaikan dan penurunan pajak daerah dari tahun 2013 hingga 2022 telah diperhitungkan secara akurat melalui Rumus log Excel. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah masih berada pada kisaran 0-25, yang menunjukkan bahwa daerah tidak dapat melaksanakan otonomi daerah secara finansial atau masih bergantung pada pemerintah pusat.

Table 4 Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Daerah (TKD)	Kemandirian Keuangan Daerah
2013	24.148.419.000	609.747.340.000	3,96%
2014	47.846.420.000	724.609.872.000	6,60%
2015	63.600.801.000	865.617.496.000	7,35%
2016	63.623.624.000	946.614.743.000	6,72%
2017	100.514.206.000	1.100.849.886.000	9,13%
2018	80.312.116.000	1.019.779.241.000	7,88%
2019	91.724.083.000	1.152.615.934.000	7,96%
2020	96.205.584.000	1.095.466.697.000	8,78%
2021	130.208.815.000	1.118.273.989.000	11,64%
2022	159.987.507.000	1.120.311.936.000	14,28%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013 hingga 2022 telah dihitung secara akurat melalui Rumus Kemandirian keuangan daerah, dan tetap berada di kisaran 0 hingga 25, yang menunjukkan bahwa daerah tidak mampu menjalankan otonomi keuangan mereka sendiri atau masih bergantung pada pemerintah pusat.

### ***Analisis Data***

#### ***Hasil Asumsi Klasik***

Setelah model penelitian ini memenuhi syarat-syarat untuk melepaskan diri dari asumsi klasik, pengujian regresi linear sederhana dapat dilakukan. Penelitian ini juga harus memenuhi asumsi normalitas, lineartisitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### ***Uji Normalitas***

Uji normalitas menentukan apakah variabel independen dan variabel dependent dalam model regresi terdistribusikan secara normal. Ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan statistik untuk menentukan apakah data penelitian ini terdistribusikan secara normal atau tidak. (Ghozali, 2017:127).

<b>Tests of Normality</b>						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pajak Daerah	,183	10	,200*	,931	10	,462
Kemandirian keuangan daerah	,203	10	,200*	,937	10	,518

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansi (p) pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 (  $p > 0,05$ ), sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal. Nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk adalah 0,462 dan 0,518 (  $p > 0,05$ ), sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk data berdistribusi normal.

### **Uji Linearitas**

Uji linearitas dilakukan untuk menentukan apakah ada atau tidak hubungan linear antara variabel dependen dan masing-masing variabel independen. Tidak mungkin menggunakan model regresi linear jika model tidak memenuhi syarat linearitas. Jika variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear, uji linearitas dapat digunakan (Sugiono dan Susanto, 2015:323). Test of linearity dapat digunakan untuk menguji linearitas.

<b>ANOVA Table</b>							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kemandirian keuangan daerah * Pajak Daerah	Between Groups	(Combined)	68,993	8	8,624	2,109	,489
		Linearity	44,135	1	44,135	10,791	,188
		Deviation from Linearity	24,858	7	3,551	,868	,681
	Within Groups		4,090	1	4,090		
	Total		73,083	9			

Ada hubungan linear secara signifikan antara Pajak Daerah (X) dan Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Ini dapat disimpulkan berdasarkan nilai signifikansi dari output sebelumnya, yang menunjukkan bahwa nilai deviasi dari Sig. Linear adalah 0,681, yang lebih besar dari 0,05.

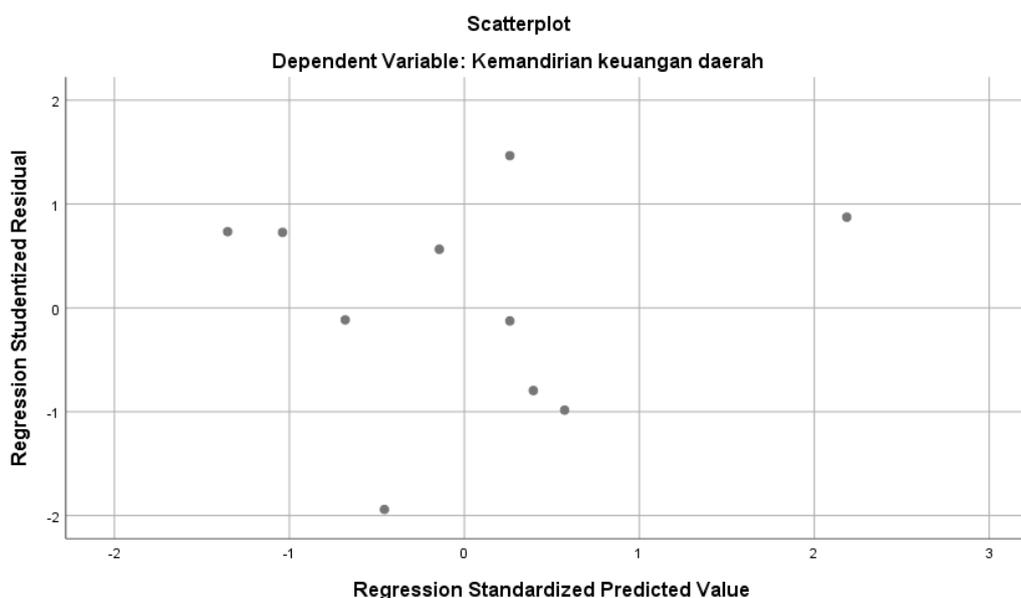
### **Uji Heteroskedastisitas**

Hubungan linear secara signifikan antara Pajak Daerah (X) dan Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dapat disimpulkan berdasarkan nilai signifikansi dari output sebelumnya; nilai deviasi dari Sig. Linear adalah 0,681, yang lebih besar dari 0,05.

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-13,397	3,956		,010
	Pajak Daerah	,466	,170	,697	,025

a. Dependent Variable: Kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil di atas, kami menemukan bahwa nilai signifikansi untuk pajak daerah adalah 0,025, dan karena nilai signifikansi di atas lebih kecil dari 0,05, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam model regresi ada gejala heteroskedastisitas.



Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada sumbu Kemandirian Keuangan Daerah tersebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah 0, yang berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

### Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  dalam model regresi linier. Autokorelasi adalah masalah yang muncul ketika ada korelasi. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu berhubungan satu sama lain. Masalah ini muncul karena residual, atau kesalahan pengganggu, tidak dapat dilepaskan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Karena "gangguan" pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya, ini sering terjadi pada runtutan waktu (time series).

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena "gangguan" pada observasi yang berbeda dari individu. Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah salah satu kategori model regresi yang baik. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak autokorelasi:

Ho : Tidak terdapat Autokorelasi ( $r = 0$ )

H1 : Terdapat Autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Adapun Uji Durbin Watson (Uji DW) memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $d < dL$  atau  $d > (4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika  $dU < d < (4-dU)$  maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

c. Jika  $dL < d < dU$  atau  $(4-dU) < d < (4-dL)$  maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti / ragu-ragu (Ghozali,2017).

### Uji Korelasi

Salah satu teknik statistik yang paling sering digunakan untuk menemukan hubungan antara dua variabel adalah analisis korelasi, yang artinya "hubungan". Tujuan analisis korelasi adalah untuk menemukan pola dan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sudaryono, 2014:67).

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,697 <sup>a</sup>	,486	,421	,26250	1,516

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah  
 b. Dependent Variable: Kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelitian, nilai R 0,697 menunjukkan koefisien korelasi yang positif, yang menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang searah atau linier jika R bernilai positif. Dengan kata lain, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) akan meningkat jika Pajak Daerah (X) meningkat.

### Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana menentukan arah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) secara linear. Jika variabel independen meningkat atau menurun, analisis ini mengetahui arah hubungan antara keduanya.

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,697 <sup>a</sup>	,486	,421	,26250	1,516

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah  
 b. Dependent Variable: Kemandirian keuangan daerah

Nilai R square sebesar 0,486 ditemukan dari output sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Daerah (X) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah 49,1%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti memengaruhi 50,9%.

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13,397	3,956		-3,386	,010
	Pajak Daerah	,466	,170	,697	2,748	,025

a. Dependent Variable: Kemandirian keuangan daerah

a = Angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam kasus ini nilainya sebesar -13.397 Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada Pajak Daerah (X) maka nilai konsisten Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar -13.397. b = Angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 466. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat Pajak Daerah (X) maka Kemandirian Keuangan Daerah (Y) akan meningkat sebesar 466.

Dengan demikian, Pajak Daerah (X) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) karena nilai koefisien regresi bernilai positif. Akibatnya, persamaan regresi adalah  $Y = -13.397 + 0.466 X$ .

***Kesimpulan Dari Uji Analisis Regresi Linear Sederhana***

Dengan mempertimbangkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah (X) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dengan total 49,1%. Ini menunjukkan bahwa setiap kali Pajak Daerah meningkat di sebuah kabupaten, itu juga akan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tersebut.

***Pengujian Hipotesis***

Uji hipotesis menggunakan p-value atau koefisien regresi sederhana untuk menentukan apakah variabel independen (X) berdampak signifikan pada variabel dependen (Y). Signifikan berarti dapat berdampak pada populasi. Langkah-langkah pengujian berikut dapat digunakan untuk mengetahui hasil analisis regresi di atas:

a. Menentukan Hipotesis

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten tolitoli

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten tolitoli

b. Membandingkan taraf signifikansi (p-value), dengan galatnya

Jika signifikansi > 0.05, maka Ho diterima

Jika signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-13,397	3,956		-3,386	,010
	Pajak Daerah	,466	,170	,697	2,748	,025

a. Dependent Variable: Kemandirian keuangan daerah

Ada kemungkinan bahwa HO ditolak dan Ha diterima, karena nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Ini menunjukkan bahwa "Ada pengaruh Pajak Daerah (X) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)."

Setelah melakukan analisis data, kami menemukan bahwa koefisien 0,697 dengan signifikansi 0,025 kurang dari 0,05 menunjukkan Ho diterima, sedangkan koefisien kurang dari 0,05 menunjukkan Ho ditolak. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara Pajak Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, yang berarti bahwa hubungan antara kedua variabel berbanding lurus atau Tidak ada tanda-tanda negatif yang menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara pajak daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Singkatnya, semakin banyak pajak daerah yang dibayarkan, semakin besar dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, baik dengan penambahan variabel maupun tidak, memiliki kesamaan dengan temuan penelitian ini. Penelitian sebelumnya oleh Ardiansyah (2023) juga telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh, pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia N.Panigoro, Anderson G.Kumenaung, Een N.Walewangko.2023. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemandirian Daerah Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 23 No.4 Bulan April 2023.
- Dandi Darmadi, Administrasi Keuangan Daerah, Malang: Penerbit Empardua Media; 2021.
- Diana Sari, M.si., AK. Q. konsep dasar perpajakan. KE 2. Aep Gunarsa S, editor. Bandung: PT Refika Aditama; 2016. 34 hal.
- Hanum Indrianingrum dan Nuwun Priyono. 2023. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2006-2021. Jurnal ECONOMINA. Vol.2 No.1 Januari 2023.
- Mardiasmo.2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Riyans Ardiansyah. 2023. Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. JPRO Volume 4 No.1. E-ISSN : 2775-5967
- Sahya Anggara. 2016. Administrasi Keuangan Negara.Cetakan ke 1. Bandung:CV.Pustaka Setia.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:PT.Afabeta
- Sulteng.bps.go.id. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Tri Wahyuningsih. 2020. Ekonomi Publik. Depok : PT.RajaGrafindo Persada
- Waluyo. (2012) Akuntansi Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.